

## Pengaruh Program Indonesia Pintar bagi Para Penyandang Disabilitas

### *The Effect of Smart Indonesia Program for Disabilities*

Achmad Kautsar<sup>1</sup>, Grace Wulandari<sup>2</sup>, Jihan D.N<sup>3</sup>, Qori'atul Septiavin<sup>4</sup>, Ni Putu Mia Tarani<sup>5</sup>,  
Amri Umu Amiroh<sup>6</sup>, Annisa Fitri<sup>7</sup>, dan Citra Kumala<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Universitas Pertamina, Jl. Teuku Nyak Arief, achmad.kautsar@universitaspertamina.ac.id, 085691001616

<sup>8</sup>Alumni University of Warwick, Coventry CV4 7AL (UK), citrakmla@gmail.com

Diterima 21 Juli 2021, diperbaiki 27 September 2021, disetujui 04 Oktober 2021

#### **Abstract**

*People with disabilities are generally in a close position to poverty or trapped in so-called vicious cycle. One of the reasons is that because their education level is very low. This study aims to analyze factors that can increase the education level of the disabilities. This study uses four logit models that compare people with mild disabilities with severe disabilities. The logit model is used to analyze the probability of events. The results show that government subsidies in the education sector (PIP) have a significant positive effect on increasing the education level of the disabilities. The education inequality between urban and rural areas still occurs, the results show that the probability of individuals living in urban areas has a higher chance of going to school than rural areas. Increasing subsidies in the education sector is a solution to reduce the educational inequality between the disabilities and non-disabled persons. An equitable development of school buildings is needed to reduce the disparity between urban and rural areas.*

**Keywords:** *disable; education; subsidy*

#### **Abstrak**

Penyandang disabilitas memiliki permasalahan dimana para penyandang disabilitas sangat dekat dengan kemiskinan atau terjebak dalam vicious cycle. Situasi tingkat pendidikan untuk kelompok para penyandang disabilitas sangat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi para penyandang disabilitas dapat meningkatkan tingkat pendidikan. Penelitian ini menggunakan empat model logit yang membandingkan antara para penyandang disabilitas ringan dengan disabilitas berat. Model logit digunakan untuk menganalisis probabilitas kejadian. Hasil menunjukkan bahwa subsidi pemerintah di sektor pendidikan (PIP) memberikan dampak yang positif signifikan meningkatkan tingkat pendidikan bagi para penyandang disabilitas. Ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih terjadi, hasil menunjukkan bahwa probabilitas individu yang tinggal di perkotaan memiliki peluang untuk bersekolah lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Peningkatan subsidi di sektor pendidikan menjadi solusi agar ketimpangan pendidikan antara para penyandang disabilitas dan non-disabilitas dapat diperkecil. Pemerataan gedung sekolah juga perlu ditingkatkan agar tidak terjadi disparitas yang tinggi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

**Kata kunci:** *disabilitas; pendidikan; subsidi*

#### **Pendahuluan**

Data WHO menunjukkan bahwa terdapat 2 sampai dengan 4 orang dari 100 orang dengan memiliki keterbatasan (disabilitas) (World Health Organization & World Bank, 2011). Penambahan populasi di Indonesia diiringi juga dengan meningkatnya jumlah individu yang memiliki keterbatasan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi disabilitas seperti kecelakaan, kekurangan

nutrisi ketika selama di dalam kandungan atau selama pertumbuhan balita. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016, jenis disabilitas dibagi dalam 4 kelompok, diantaranya adalah penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik.

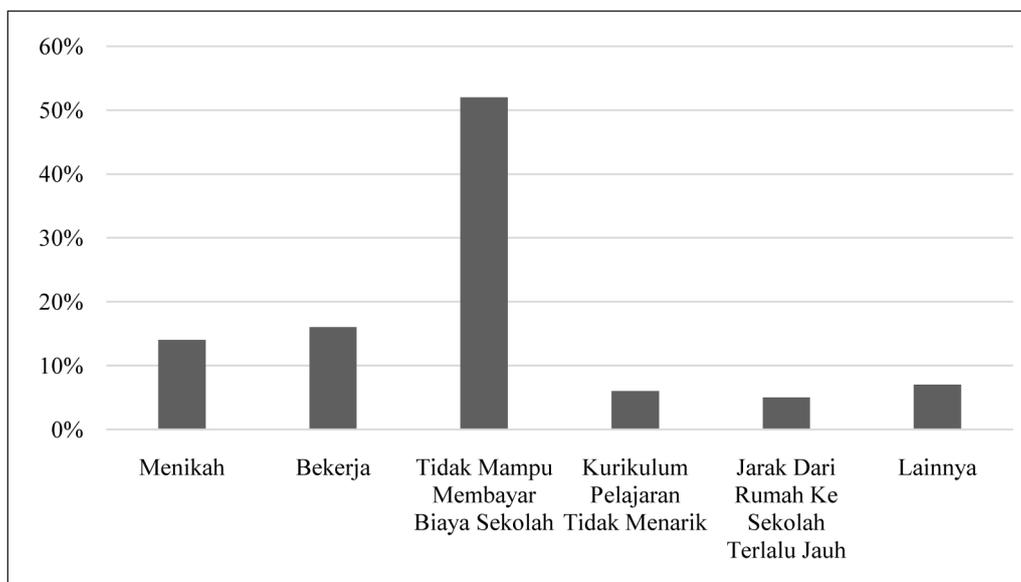
Data yang dipublikasikan oleh kementerian kesehatan menunjukkan bahwa persentase para penyandang disabilitas didominasi oleh anak-

anak dengan rentang usia 15 sampai dengan 17 tahun dengan mayoritas jenis kelamin pria lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dan juga sebagian besar berada di wilayah perkotaan (Kementerian Kesehatan, 2019). Para penyandang disabilitas memiliki permasalahan tersendiri, dimana para penyandang disabilitas sangat dekat dengan kemiskinan. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan para penyandang disabilitas masih berada pada kehidupan yang miskin adalah sulitnya mengakses pendidikan. Pada negara berkembang, tingkat pendidikan para penyandang disabilitas masih rendah (World Health Organization & World Bank, 2011).

Situasi tingkat pendidikan untuk kelompok para penyandang disabilitas pada tahun 2018 sangat rendah dengan nilai persentase tidak sekolah sebesar 30,7%, tidak tamat SD/MI sebesar 28,2%, sedangkan yang dapat menempuh hingga perguruan tinggi (Diploma) sebesar 17,6%. Pada sektor pekerjaan sebagian besar para penyandang disabilitas tidak bekerja dengan nilai persentase sebesar 26,7% (Kementerian Kesehatan, 2019). Berdasarkan

hasil penelitian yang dilakukan oleh Lamichhane & Okubo (2014) menghasilkan bahwa dibutuhkan investasi di bidang pendidikan untuk para penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan partisipasi di pasar tenaga kerja. Angka kemiskinan di Indonesia untuk rumah tangga bagi para penyandang disabilitas sebesar 2,4% lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang bukan para penyandang disabilitas dan juga mendapatkan stigma sehingga adanya ketidaksetaraan untuk mengakses fasilitas publik seperti pendidikan dan kesehatan (UNICEF, 2020). Rendahnya pendidikan yang dialami oleh para penyandang disabilitas mengakibatkan para penyandang disabilitas terjebak dalam *vicious cycle*.

Pemerintah Indonesia telah memberikan subsidi untuk pendidikan dengan Program Indonesia Pintar (PIP). Salah satu faktor penyebab putusnya sekolah adalah faktor ekonomi sehingga tidak mampu membayar sekolah, adanya Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).



Gambar 1. Alasan Tidak Sekolah

Sumber: Survei UNICEF, 2016

Data survei yang dilakukan oleh UNICEF menunjukkan bahwa persentase siswa sekolah di Indonesia mengalami putus sekolah dikarenakan tidak mampu membayar biaya sekolah dengan nilai persentase 52%, diikuti oleh karena bekerja dan menikah dengan nilai persentase masing-masing 16% dan 14%. Faktor penyebab putus sekolah menurut Kementerian PPPA, terdapat tujuh alasan, diantaranya adalah pertama, bekerja/ mencari nafkah dengan persentase 15,06%, kedua menikah/ mengurus rumah tangga 7,52%, ketiga pendidikan cukup 4,9%, keempat malu karena ekonomi 2,11%, kelima karena sekolah jauh 3,1%, keenam dikarenakan cacat/disabilitas 4,56%, dan ketujuh karena faktor lainnya 26,84% (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).

Menurut Avon & Loprest (2012) pendidikan sangat penting untuk anak-anak meskipun anak tersebut memiliki keterbatasan (disabilitas). Penelitian mengenai disabilitas masih sedikit dilakukan, berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini akan menganalisis dampak dari Program Indonesia Pintar (PIP) khususnya bagi para penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari subsidi pemerintah dibidang pendidikan pada Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap angka partisipasi sekolah bagi para penyandang disabilitas. Penelitian ini juga memasukkan variabel lainnya yang dapat memengaruhi individu untuk bersekolah, seperti faktor jenis kelamin dan demografi.

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan yang diberikan langsung kepada siswa. Program Indonesia Pintar (PIP) sudah dilakukan sejak tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 2 Tahun 2015. Program Indonesia Pintar merupakan implementasi dari instruksi Presiden yang tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program

Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Sasaran dari Program Indonesia Pintar (PIP) adalah siswa yang berasal dari keluarga yang tergolong miskin atau tidak mampu. PIP merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Adanya PIP diharapkan para siswa miskin dapat menempuh wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan dengan wajib belajar 12 tahun. Kelompok prioritas yang akan mendapatkan PIP diantaranya:

1. Peserta didik memiliki KIP (Kartu Indonesia Pintar)
2. Peserta didik berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, dan atau pertimbangan khusus
  - a) Peserta didik merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
  - b) Peserta didik pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
  - c) Peserta didik berstatus yatim piatu/ yatim/ piatu dari sekolah/ panti sosial/ panti asuhan
  - d) Peserta didik terkena dampak bencana alam
  - e) Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orangtua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah
  - f) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya; g) Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

Pemanfaatan dana PIP bertujuan untuk membantu biaya peserta didik agar dapat melanjutkan sekolah sampai dengan ke tingkat pendidikan menengah. Selain itu, pemberian bantuan melalui PIP merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berisikan bahwa dana untuk pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah. Dana PIP yang diberikan oleh pemerintah meliputi biaya buku dan alat tulis, pakaian seragam dan perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, biaya kursus, dan biaya praktik tambahan. Berdasarkan variabel dana PIP yang diberikan oleh pemerintah diharapkan adanya peningkatan angka partisipasi sekolah sehingga indeks pembangunan manusia di Indonesia juga akan meningkat.

Salah satu faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah adanya ketidakcukupan untuk mengakses pendidikan (Mont & Cuong, 2011). Pendidikan merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi pendidikan akan meningkatkan probabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi, tingkat pendidikan para penyandang disabilitas cukup rendah, data statistik menunjukkan bahwa tingkat pendidikan para penyandang disabilitas sebagian besar tidak tamat SD dan lulusan SD (Kementerian Kesehatan, 2019). Hal ini yang menyebabkan para penyandang disabilitas erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan (Braithwaite & Mont, 2009; Elwan, 1999; Hoogeveen, 2005; Yeo & Moore, 2003). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Filmer (2008) pada 13 negara berkembang menunjukkan bahwa para penyandang disabilitas berada pada kondisi miskin dan sebagian besar memiliki pendidikan yang rendah. Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksi dengan berbagai hambatan dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain (United Nations, 2006).

Pemerintah telah mengatur mengenai pendidikan inklusif yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Bagi Peserta Didik Yang Memiliki

Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa. Berdasarkan teori sumber daya manusia, memberikan sebuah indikasi bahwa tingkat pendidikan dapat menjadi sebuah inisial meningkatkan pendapatan (Yang & Qiu, 2016). Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah bagi seseorang yang menyandang disabilitas mengakibatkan pada tingkat kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas juga rendah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah et al. (2015) menghasilkan bahwa pendidikan merupakan cara yang efektif untuk mengurangi ketimpangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak dari Program Indonesia Pintar (PIP), status sosial ekonomi, dan faktor demografi terhadap probabilitas partisipasi sekolah.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan model probit. Model probit digunakan untuk menganalisis probabilitas kejadian, hal ini dikarenakan variabel dependen yang digunakan adalah *binary variable*. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor Maret 2019. Interpretasi hasil dari logit menggunakan *marginal effect* agar memudahkan dalam menganalisis sehingga hasil dari *marginal effect* merupakan nilai persentase dari sebuah koefisien. Terdapat dua model di dalam penelitian ini:

1. Model pertama dengan individu berumur 6 tahun sampai dengan 17 tahun, variabel yang akan dianalisis adalah probabilitas kejadian yang memengaruhi partisipasi sekolah
  - a)  $Partisipasi\ Sekolah_i = \beta_0 + \beta_1\ jenis\ kelamin_i + \beta_2\ urban_i + \beta_3\ ln\ pengeluaran_i + \beta_4\ disabilitas\ berat_i + \beta_5\ disabilitas\ berat\ pip_i (1)$
  - b)  $Partisipasi\ Sekolah_i = \beta_0 + \beta_1\ jenis\ kelamin_i + \beta_2\ urban_i + \beta_3\ ln\ pengeluaran_i + \beta_4\ disabilitas\ ringan_i + \beta_5\ disabilitas\ ringan\ pip_i (2)$

2. Model kedua dengan individu berumur 18 tahun sampai dengan 65 tahun, variabel yang akan dianalisis adalah probabilitas kejadian yang memengaruhi individu menamatkan sekolah sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

$$a) \text{ Tamat SMA}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{ jenis kelamin}_i + \beta_2 \text{ urban}_i + \beta_3 \ln \text{ pengeluaran}_i + \beta_4 \text{ disabilitas berat}_i + \beta_5 \text{ disabilitas berat}_i \quad (3)$$

$$b) \text{ Tamat SMA}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{ jenis kelamin}_i + \beta_2 \text{ urban}_i + \beta_3 \ln \text{ pengeluaran}_i + \beta_4 \text{ disabilitas ringan}_i + \beta_5 \text{ disabilitas ringan}_i \quad (4)$$

### Pengukuran Disabilitas

Pengukuran disabilitas cukup kompleks dan banyak cara untuk mengukurnya. Survei untuk mengukur seseorang termasuk kedalam kategori penyandang disabilitas atau tidak dengan menggunakan kuesioner yang berasal dari Susenas. Pertanyaan pada kuesioner untuk para penyandang disabilitas dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1  
Contoh Pertanyaan Kuesioner

<b>Definisi Disabilitas</b>
<p>Frase pengantar: Pertanyaan berikutnya menanyakan tentang kesulitan yang mungkin Anda miliki dalam melakukan sesuatu kegiatan karena MASALAH KESEHATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Anda mengalami kesulitan melihat, meskipun memakai kacamata?                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak – tidak ada kesulitan</li> <li>b. Ya – beberapa kesulitan</li> <li>c. Ya – banyak kesulitan</li> <li>d. Tidak bisa sama sekali</li> </ol> </li> </ol> <p>Pertanyaan yang tersisa memiliki kategori respons yang sama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Apakah Anda mengalami kesulitan mendengar meskipun menggunakan alat bantu dengar?</li> <li>3. Apakah Anda mengalami kesulitan berjalan atau menaiki tangga?</li> <li>4. Apakah Anda mengalami kesulitan mengingat atau berkonsentrasi?</li> <li>5. Apakah Anda mengalami kesulitan (dengan perawatan diri seperti) mencuci seluruh tubuh atau berpakaian?</li> </ol> <p>Menggunakan bahasa (adat) Anda yang biasa, apakah Anda mengalami kesulitan berkomunikasi, misalnya mengerti atau dimengerti?</p> <p>Penyandang disabilitas berat = 1, jika responden menjawab banyak kesulitan atau tidak bisa sama sekali dan lainnya = 0</p> <p>Penyandang disabilitas ringan = 1, jika responden menjawab beberapa kesulitan atau banyak kesulitan atau tidak bisa sama sekali, dan lainnya = 0</p>

Sumber: Washington Group 2008, Mont & Cuong (2011)

Data yang digunakan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor Maret 2019 dengan mengambil pertanyaan keterangan gangguan fungsional. Pertanyaan mengenai keterangan gangguan fungsional yang terdapat pada Susenas mengacu pada Washington Group. Tabel 1 merupakan contoh pertanyaan yang digunakan pada kuesioner Susenas. Seseorang dikategorikan penyandang disabilitas berat apabila responden menjawab banyak kesulitan

atau tidak bisa sama sekali dan responden dikategorikan disabilitas ringan jika responden menjawab pertanyaan beberapa kesulitan atau banyak kesulitan atau tidak bisa sama sekali.

### Deskripsi Variabel

Tabel di bawah ini akan menggambarkan situasi variabel yang akan diteliti dengan data yang bersumber dari Susenas tahun 2019. Variabel yang akan digunakan dalam penelitian

ini yang termasuk ke dalam kategori dan non-kategori. Kategori variabel adalah partisipasi sekolah, tamat sekolah sampai dengan jenjang menengah atas, para penyandang disabilitas, penerima PIP, jenis kelamin, dan wilayah

tempat tinggal. Variabel nonkategori adalah pengeluaran. Rentang umur yang digunakan dalam penelitian antara 6 tahun sampai dengan 65 tahun.

Tabel 2  
Deskripsi Variabel

Variabel	Deskripsi	Rata-Rata	Persentase
Partisipasi Sekolah	1: Bersekolah 0: Lainnya		1: 27,04% 0: 72,96%
Tamat Pendidikan <i>Secondary School</i>	1: <i>Secondary School</i> 0: Lainnya		1: 42,03% 0: 57,97%
Disabilitas Berat	1: Disabilitasberat 0: Lainnya		1: 1,69% 0: 98,31%
Disabilitas BeratPIP	1: Disabilitas berat penerima PIP 0: Lainnya		1: 0,02% 0: 99,98%
Jenis Kelamin	1: Pria 0: Lainnya		1: 50,43% 0: 49,57%
Umur (6-65 tahun)	Rata-rata umur responden	16 tahun	
Wilayah	1: Perkotaan 0: Lainnya		1: 56,27% 0: 43,73%
Total Pengeluaran per bulan	Logaritma pengeluaran per bulan	Rp. 4.927.169	
Disabilitas Ringan	1: Penyandang disabilitas ringan 0: Lainnya		1: 7,79% 0: 92,21%
Disabilitas RinganPIP	1: Disabilitas ringan penerima PIP 0: Lainnya		1: 0,07% 0: 99,93%

Sumber: Susenas,2019 (Data Diolah)

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden tidak bersekolah dengan nilai persentasesebesar 72,96%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia masih cukup rendah. Variabel lainnya yang cukup menarik adalah variabel para penyandang disabilitas yang mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP), persentase yang mendapatkan subsidi dari pemerintah tersebut sebesar 0,02% untuk penyandang disabilitas dan untuk para penyandang disabilitas yang tergolong ringan sebesar 0,07%. Jika dibandingkan nilai persentase yang mendapatkan PIP dengan nilai persentase para penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas ringan tidak proporsional, hal ini menunjukkan masih

terdapat tidak adanya pemerataan dalam pemberian PIP. Pada variabel umur, rata-rata umur responden adalah 16 tahun dengan tingkat pengeluaran per bulan rata-rata sebesar Rp. 4.927.269. Pada variabel tempat tinggal, rata-rata responden sebagian besar berada di wilayah perkotaan dibandingkan di pedesaan dengan nilai persentasemasing-masing sebesar 56,27% dan 43,73%. Pada tingkat pendidikan, persentaseresponden yang menamatkan sampai dengan ke jenjang sekolah menengah sebesar 42,03%.

### Hasil dan Pembahasan

Hasil pada Tabel 3, menunjukkan perbandingan hasil dari beberapa model. Terdapat empat kategori model diantaranya

pada model 1 dan model 2 menggunakan umur 6 tahun sampai dengan 21 tahun dengan variabel dependen menggunakan partisipasi sekolah. Kedua model tersebut memiliki perbedaan, yaitu pada model 1 menggunakan variabel disabilitas dan model 2 menggunakan variabel

disabilitas ringan. Pada model 3 dan 4 umur yang digunakan antara umur 18 tahun sampai dengan 62 tahun dengan variabel dependen individu yang menamatkan sampai dengan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tabel 3  
Hasil *Marginal Effect*

VARIABEL	Model (1)	Model (2)	Model (3)	Model (4)
	Umur 6-21 Tahun Partisipasi Sekolah	Umur 6-21 Tahun Partisipasi Sekolah	Umur 18-62 Tahun Menamatkan SMA	Umur 18-62 Tahun Menamatkan SMA
Disabilitas Berat	-0,165*** (0,000465)		-0,232*** (0,000295)	
Jenis Kelamin	-0,0143*** (9,67e-05)	-0,0146*** (9,67e-05)	0,0654*** (7,51e-05)	0,0619*** (7,48e-05)
Wilayah	0,0199*** (0,000101)	0,0204*** (0,000101)	0,116*** (7,71e-05)	0,114*** (7,67e-05)
Log (Pengeluaran)	0,0376*** (8,24e-05)	0,0379*** (8,23e-05)	0,0530*** (6,06e-05)	0,0487*** (6,05e-05)
Disabilitas Berat PIP	0,360*** (0,00263)		0,528*** (0,00633)	
Disabilitas Ringan		-0,129*** (0,000302)		-0,216*** (0,000131)
Disabilitas Ringan PIP		0,354*** (0,00169)		0,594*** (0,00464)

Standard errors in parentheses\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1

Berdasarkan hasil pada Tabel 3, menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki pengaruh yang signifikan pada keempat model. Tujuan dibuatnya kategori sampai dengan 4 perbedaan model untuk menganalisis dari setiap perbedaan peluang antara individu disabilitas dengan individu yang termasuk disabilitas ringan. Hasil dari model logit yang digunakan merupakan hasil *marginal effect* untuk memudahkan interpretasi dari setiap variabel.

### Penyandang Disabilitas Berat dan Penyandang Disabilitas Ringan

Variabel individu yang memiliki disabilitas dan disabilitas ringan memiliki hubungan probabilitas untuk berpartisipasi sekolah lebih rendah dibandingkan dengan individu yang tidak disabilitas. Pada variabel individu dengan

disabilitas memiliki probabilitas lebih rendah untuk partisipasi sekolah rata-rata sebesar 16,5% dibandingkan dengan individu yang tidak disabilitas. Hasil tersebut juga diikuti dengan individu yang termasuk kedalam disabilitas ringan memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk berpartisipasi sekolah rata-rata sebesar 12,9%. Terdapat perbandingan yang berbeda antara para penyandang disabilitas berat dengan disabilitas ringan, yaitu sebesar 3,6%, para penyandang disabilitas ringan memiliki probabilitas lebih tinggi untuk berpartisipasi sekolah. Pendidikan menjadi hal yang penting untuk terlepas dari *vicious cycle* yang terjadi pada para penyandang disabilitas. Tingkat probabilitas yang rendah untuk berpartisipasi sekolah menjadi faktor para penyandang disabilitas masih berada dalam kemiskinan.

Para penyandang disabilitas mungkin memiliki kehidupanyang tidak lebih baik dibandingkan anggota rumah tangga lainnya dalam indikator seperti malnutrisi dan akses ke pendidikan (L.M. Banks & Zuurmond, 2015; Lena Morgon Banks et al., 2017; Kuper et al., 2015)

Penyebab terbatasnya mengakses ke pendidikan menyebabkan para penyandang disabilitas tidak dapat menempuh pendidikan tinggi. Hasil pada kategori 3 dan 4 memiliki hasil yang negatif, para penyandang disabilitas berat memiliki peluang untuk menamatkan sekolah menengah lebih rendah rata-rata sebesar 23,2%, dan para penyandang disabilitas ringan memiliki probabilitas lebih rendah untuk menempuh sekolah menengah rata-rata sebesar 21,6% dibandingkan dengan individu yang nondisabilitas. Timbulnya disabilitas pada individu menyebabkan individu tersebut memiliki standar hidup yang lebih rendah sehingga berdampak buruk terhadap tingkat pendidikan yang rendah, pekerjaan, dan pendapatan yang rendah (Mitra et al., 2013). Faktor lain yang dapat menyebabkan rendahnya pendidikan para penyandang disabilitas di Indonesia disebabkan kurangnya gedung sekolah yang dapat mendukung, sebagai contoh sekolah-sekolah yang bertingkat masih tidak terdapat atau kurangnya lift. Lift sangat diperlukan di sekolah yang bertingkat bagi para penyandang disabilitas. Selain itu, jumlah sekolah untuk para penyandang disabilitas masih sangat sedikit, adanya perbedaan dengan para penyandang disabilitas menyebabkan para penyandang disabilitas tidak dapat menempuh pendidikan yang tinggi.

Program subsidi dari pemerintah berupa PIP, para penyandang disabilitas sangat terbantu untuk meningkatkan pendidikannya. Berdasarkan hasil pada Tabel 3, menunjukkan bahwa para penyandang berat dan ringan memiliki dampak yang positif pada keempat model. Nilai probabilitas para penyandang disabilitas yang mendapatkan PIP untuk berpartisipasi sekolah rata-rata sebesar 36%

untuk kategori disabilitas berat dan 35,4% untuk kategori disabilitas ringan. Di sisi lain, probabilitas para penyandang disabilitas yang mendapatkan PIP diprediksi memiliki dampak positif untuk menempuh sekolah menengah. Hasil probabilitas para penyandang disabilitas untuk menempuh sekolah menengah, rata-rata sebesar 52,8% untuk para disabilitas berat dan 59,4% untuk para penyandang disabilitas ringan. Bantuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi para penyandang disabilitas cukup efektif. Anak dengan disabilitas termasuk kedalam kelompok yang terdampak dari kemiskinan sehingga diperlukan intervensi yang efektif untuk melawan kemiskinan (UNICEF, 2020). Diperlukan serangkaian kebijakan sosial yang luas dan terarah termasuk kebijakan pendidikan untuk mengurangi kemiskinan karena pendidikan dan pelatihan memiliki dampak langsung kepada masyarakat (Mihai et al., 2015).

#### **Wilayah dan Jenis Kelamin**

Hasil pada Tabel 3, menunjukkan bahwa wilayah perkotaan memiliki probabilitas lebih tinggi bersekolah dan juga menamatkan sekolah menengah. Keempat model menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas sampai dengan 11,6%. Pada model pertama dan ketiga dengan menggunakan variabel disabilitas berat sebagai variabel kontrol, wilayah perkotaan memiliki probabilitas lebih tinggi untuk menempuh pendidikan dibandingkan wilayah pedesaan, masing-masing dengan nilai probabilitas 1,9% dan 11,6%. Pada model kedua dan keempat dengan menggunakan variabel kontrol para penyandang disabilitas ringan memiliki dampak yang sama, yaitu wilayah perkotaan memiliki probabilitas lebih tinggi untuk menempuh pendidikan dibandingkan wilayah pedesaan dengan nilai probabilitas masing-masing 2,04% dan 11,4%. Hal ini dapat disebabkan infrastruktur di wilayah perkotaan lebih mendukung dibandingkan di wilayah pedesaan sehingga akses menuju ke sekolah lebih

mudah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa terdapat kesenjangan Angka Partisipasi Kasar (APK) antara kota dan desa pada pendidikan usia dini sebesar 38,54% dan 36,29% meskipun persentase ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Selain itu, berdasarkan Angka Kesiapan Sekolah (AKS) persentase kesenjangan antara kota dan desa masing-masing sebesar 80,11% dan 69,15% (BPS, 2020). Penurunan persentase menjadi sebuah tanda bahwa telah terjadi peningkatan pemerataan pendidikan antara kota dan desa.

Pada variabel jenis kelamin di model pertama dan kedua, menunjukkan bahwa probabilitas pria untuk partisipasi sekolah lebih rendah dibandingkan dengan wanita dengan nilai probabilitas rata-rata sebesar 1,4%. Sedangkan pada model ketiga dan keempat nilai probabilitas pria untuk menamatkan sampai dengan jenjang ke sekolah menengah lebih besar dibandingkan dengan wanita dengan nilai probabilitas rata-rata 6%. Alasan probabilitas wanita lebih tinggi untuk partisipasi sekolah dibandingkan dengan pria dapat disebabkan sebagian besar disibukkan untuk mencari penghasilan tambahan bagi keluarganya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mwachofi (2009) menghasilkan bahwa pendidikan wanita lebih baik dibandingkan pria meskipun tidak menjamin mendapatkan pendapatan atau pekerjaan yang lebih baik dibandingkan pria. Sedangkan probabilitas untuk menempuh sampai dengan jenjang sekolah menengah probabilitas pria lebih tinggi dibandingkan dengan wanita dapat disebabkan oleh masyarakat di Indonesia masih menganut sistem patriarki. Pria merupakan sentral dari dalam kepemimpinan sehingga terdapat diskriminasi terhadap wanita. Hal ini yang akan berdampak pada perbedaan tingkat pendidikan antara pria dan wanita. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS persentase peserta didik masih didominasi jenis kelamin pria (BPS, 2020).

### **Pengeluaran**

Variabel pengeluaran pada Tabel 3 menghasilkan hubungan yang positif antara pengeluaran terhadap pendidikan. Pada keempat model tersebut memberikan pengaruh yang cukup signifikan, semakin tinggi pengeluaran rumah tangga dapat memberikan dampak kenaikan partisipasi sekolah dan menempuh pendidikan menengah. Probabilitas peningkatan partisipasi sekolah jika rumah tangga meningkatkan pengeluarannya rata-rata sebesar 3,7% (model 1 dan model 2). Pada model 3 dan model 4 juga memberikan dampak yang positif signifikan dengan masing-masing memiliki nilai probabilitas 5,3% dan 4,8%. Keterbatasan dari hasil ini tidak menunjukkan secara detail jenis pengeluaran yang dikeluarkan. Penghitungan pada variabel pengeluaran berdasarkan pengeluaran konsumsi dan nonkonsumsi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini, semakin tinggi pengeluaran menandakan bahwa rumah tangga tersebut termasuk kedalam kategori rumah tangga mampu. Artinya, rumah tangga tersebut tergolong rumah tangga mampu (tidak miskin) probabilitas untuk menempuh pendidikan semakin tinggi. Proporsi kenaikan pengeluaran pada rumah tangga akan diikuti dengan meningkatnya proporsi pengeluaran untuk pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Rizk & Owusu-Afriyie (2014) melaporkan bahwa pengeluaran untuk pendidikan anak meningkat secara signifikan dengan meningkatnya tingkat pendapatan rumah tangga. Penelitian lainnya menghasilkan bahwa pendapatan rumah tangga berdampak pada tingginya pengeluaran terhadap pendidikan (Qian & Smyth, 2011).

### **Penutup**

**Kesimpulan:** Hasil dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketimpangan pendidikan antara para penyandang disabilitas dan nondisabilitas. Faktor-faktor seperti status sosial ekonomi memiliki pengaruh dan faktor demografi dapat mempengaruhi probabilitas

partisipasi sekolah. Semakin tinggi status sosial ekonomi, berdampak pada semakin tinggi probabilitas untuk bersekolah dan individu yang tinggal di wilayah perkotaan memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk bersekolah.

Subsidi PIP yang diberikan kepada para penyandang disabilitas memberikan dampak yang positif signifikan. PIP diharapkan dapat membantu peningkatan kualitas pendidikan khususnya kepada para penyandang disabilitas. Penelitian ini memiliki keterbatasan bahwa tidak secara spesifik berapa proporsi pengeluaran untuk pendidikan sehingga hasil yang analisis yang dihasilkan berupa prediksi probabilitas kejadian.

**Rekomendasi:** Pemerintah sebaiknya meningkatkan subsidi untuk para penyandang disabilitas. Hasil menunjukkan bahwa subsidi pemerintah khususnya sektor pendidikan (PIP) memberikan dampak yang positif signifikan. Persentase PIP untuk para penyandang disabilitas masih sangat kecil sehinggalah ini yang menyebabkan para penyandang disabilitas masih berada dalam kemiskinan. Selain itu, para penyandang disabilitas diberikan kemudahan untuk mengakses fasilitas layanan publik. Sebagian besar gedung-gedung sekolah tidak ramah terhadap para penyandang disabilitas, seperti tidak tersedianya tangga atau lift khusus para penyandang disabilitas. Sebaiknya pemerintah menyediakan fasilitas yang ramah untuk para penyandang disabilitas atau membuat kebijakan bahwa setiap gedung sekolah memberikan fasilitas khusus kepada para penyandang disabilitas, seperti tangga khusus, parkir kendaraan khusus, atau lift khusus.

### Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan tidak lepas dari dukungan penuh

Universitas Pertamina yang telah memberikan fasilitas-fasilitas agar penelitian ini dapat berjalan. Kontribusi dari para mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini juga sangat membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

### Pustaka Acuan

- Abdullah, A., Doucouliagos, H., & Manning, E. (2015). Does education reduce income inequality? A meta-regression analysis. *Journal of Economic Surveys*, 29(2), 301–316. <https://doi.org/10.1111/joes.12056>
- Avon, L., & Loprest, P. (2012). Disability and the education system. *Future of Children*, 22(1), 97–122. <https://doi.org/10.1353/foc.2012.0007>
- Banks, L.M., & Zuurmond, M. (2015). Barriers and enablers to inclusion in education for children with disabilities in Malawi. *Norwegian Association of Disabled*, 1–42.
- Banks, Lena Morgon, Kuper, H., & Polack, S. (2017). Poverty and disability in low- and middle-income countries: A systematic review. *Plos One*, 12(12), e0189996. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189996.t003>
- BPS. (2020). *Statistik Pendidikan 2020*.
- Braithwaite, J., & Mont, D. (2009). Disability and poverty: A survey of World Bank Poverty Assessments and implications. *Alter*, 3(3), 219–232. <https://doi.org/10.1016/j.alter.2008.10.002>
- Elwan, A. (1999). Poverty and Disability: A Survey of the Literature, SP Discussion Paper No. 9932. *World Bank*, 9932. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/488521468764667300/pdf/multi-page.pdf>
- Filmer, D. (2008). Disability, poverty, and schooling in developing countries: Results from 14 household surveys. *World Bank Economic Review*, 22(1), 141–163. <https://doi.org/10.1093/wber/lhm021>
- Hoozeveer, J. G. (2005). Measuring welfare for small but vulnerable groups: Poverty and disability in Uganda. *Journal of African Economies*, 14(4), 603–631. <https://doi.org/10.1093/jae/eji020>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Situasi Disabilitas. *Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI*, 1–10.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Kajian Program Indonesia Pintar*. [http://repositori.kemdikbud.go.id/15823/1/Kajian\\_program\\_Ind\\_Pintar.pdf](http://repositori.kemdikbud.go.id/15823/1/Kajian_program_Ind_Pintar.pdf)
- Kuper, H., Nyapera, V., Evans, J., Munyendo, D., Zuurmond, M., Frison, S., Mwenda, V., Otieno, D., & Kisia, J. (2015). Malnutrition and Childhood Disability in Turkana, Kenya: Results from a Case-

- Control Study. *PLoS ONE*, *10*(12), 1–13. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0144926>
- Lamichhane, K., & Okubo, T. (2014). The Nexus between Disability, Education, and Employment: Evidence from Nepal. *Oxford Development Studies*, *42*(3), 439–453. <https://doi.org/10.1080/13600818.2014.927843>
- Mihai, M., Țițan, E., & Manea, D. (2015). Education and Poverty. *Procedia Economics and Finance*, *32*(15), 855–860. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01532-4](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01532-4)
- Mitra, S., Posarac, A., & Vick, B. (2013). Disability and Poverty in Developing Countries: A Multidimensional Study. *World Development*, *41*(1), 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.024>
- Mont, D., & Cuong, N. V. (2011). Disability and poverty in Vietnam. *World Bank Economic Review*, *25*(2), 323–359. <https://doi.org/10.1093/wber/lhr019>
- Mwachofi, A. K. (2009). Gender difference in access and intervention outcomes: The case for women with disabilities. *Disability and Rehabilitation*, *31*(9), 693–700. <https://doi.org/10.1080/09638280802305929>
- Qian, J. X., & Smyth, R. (2011). Educational expenditure in urban China: Income effects, family characteristics and the demand for domestic and overseas education. *Applied Economics*, *43*(24), 3379–3394. <https://doi.org/10.1080/00036841003636292>
- Rizk, R., & Owusu-Afriyie, J. (2014). Determinants of household expenditure on children's education in Egypt. *International Journal of Education Economics and Development*, *5*(4), 332–360. <https://doi.org/10.1504/IJEED.2014.067194>
- UNICEF. (2020). Situasi Anak di Indonesia - Tren, Peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-hak Anak. In *Unicef*. <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-Indonesia-2020.pdf>
- United Nations. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol. In *United Nations Development Programme*. <https://doi.org/10.5463/DCID.v29i4.656>
- World Health Organization & World Bank. (2011). Summary World Report On Disability. In *World Health Organization*. <https://doi.org/10.1136/ip.2007.018143>
- Yang, J., & Qiu, M. (2016). The impact of education on income inequality and intergenerational mobility. *China Economic Review*, *37*, 110–125. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2015.12.009>
- Yeo, R., & Moore, K. (2003). Including disabled people in poverty reduction work: “nothing about us, without us.” *World Development*, *31*(3), 571–590. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(02\)00218-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(02)00218-8)

